

MENCARI KESEIMBANGAN
Pengelolaan Interaksi Antara Masyarakat dan Kawasan
Taman Nasional Alas Purwo

Laporan studi lapangan

Disusun oleh:
Sam Beckman

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
PROGRAM ACICIS
Januari 2004

KATA PENGANTAR

Laporan ini merupakan hasil untuk memenuhi keperluan program *Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies* (ACICIS) pada angkatan 19, Semester Ganjil 2004. Studi lapangan dilakukan di Malang, Banyuwangi dan Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, di bawah bimbingan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua dosen di UMM, khususnya Pak Habib, Bu Tri, dan pembimbing saya Pak Saiman, untuk dukungan dan bantuannya. Terima kasih juga kepada Pak Tom Hunter, *Resident Director* program ACICIS, dan semua pegawai ACICIS di Yogyakarta untuk dukungan dan semangatnya.

Terima kasih banyak kepada Ferry (redaktur saya!) yang membaca dan memperbaiki sebagian besar laporan ini sehingga bahasanya jauh lebih benar.

Saya ingin kembali ke Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) di Trawas, Jawa Timur, tetapi sayang tidak ada waktunya pada akhir tahun lalu. Kepada Mbak Novi dan semua di sana saya mengucapkan terima kasih.

Kepada Kris dan semua orang lain di Gintangan, Banyuwangi, terima kasih juga untuk menerima saya (dan adik saya) di rumah dan kesediaan mengantarkan kami kemana-mana, bahkan kalau jauh atau panas.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hudiyono, Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo, dan Mbak Dian untuk dukungan dan bantuannya. Kepala Sub-Seksi Rowobendo Pak Bambang juga sangat membantu, dan juga Mas Gendut dan semua pegawai lain di kantor Taman Nasional Alas Purwo di Pasaranyar.

Kedua kalinya saya datang ke daerah Taman Nasional Alas Purwo saya tinggal di dua rumah. Pertama, saya tinggal di rumah Pak dan Bu Joe. Kemudian saya tinggal di rumah Pak Yadi, Kepala Desa Kutorejo, dan keluarganya. Saya sangat berterima kasih untuk kesediaan mereka menerima saya di rumahnya, dan untuk informasi dan bantuan yang diberi olehnya. Terima kasih banyak juga kepada Mas Banadi yang mengantar saya kemana-mana dan memberikan banyak informasi.

Kepada masyarakat di sekitar Taman Nasional Alas Purwo, khususnya yang saya wawancarai secara formal atau informal dan yang ramah-ramah, saya mengucapkan terima kasih dan semoga sukses pada masa depan.

Terima kasih kepada keluarga saya di Australia, dan semua teman saya di Australia dan Indonesia, untuk dukungan yang berulang.

Dan akhirnya, tanpa Mas Cipto studi lapangan ini tidak bisa dilakukan. Untuk menguruskan semua, memberikan informasi banyak sekali, mengantar saya kemana-mana, menjadi penerjemah yang luar biasa, dan semua bentuk bantuan yang lain, saya sangat berterima kasih.

Saya berharap laporan ini berguna dan bisa membantu dalam pengelolaan Taman Nasional Alas Purwo dan kesejahteraan lingkungan alam dan masyarakat.

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------|---|----|
| KATA PENGANTAR | 1 | |
| ABSTRAKSI | 3 | |
| 1 | PENDAHULUAN | 4 |
| 1.1 | Sejarah Singkat Konsep Taman Nasional di Indonesia | 4 |
| 1.2 | Taman Nasional Alas Purwo Dalam Konteksnya | 6 |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan | 8 |
| 2 | METODOLOGI | 9 |
| 2.1 | Metode Studi Lapangan | 9 |
| 2.2 | Kesulitan dan Keterbatasan | 9 |
| 3 | LATAR BELAKANG | 11 |
| 3.1 | Kronologi Singkat Kawasan Taman Nasional Alas Purwo | 11 |
| 3.2 | Keadaan Umum | 12 |
| 4 | HASIL DAN PEMBAHASAN | 17 |
| 4.1 | Tingkat Ketergantungan Tinggi Terhadap Kawasan Taman Nasional Alas Purwo | 17 |
| 4.2 | Bentuk-Bentuk Penghasilan | 18 |
| 4.3 | Akibat-Akibat Pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Alas Purwo | 26 |
| 4.4 | Bentuk-Bentuk Pengelolaan | 30 |
| 4.5 | Alternatif Pengelolaan Taman Nasional Alas Purwo | 34 |
| 5 | PENUTUP | 37 |
| 5.1 | Kesimpulan | 37 |
| 5.2 | Saran | 37 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 38 |
| | DAFTAR WAWANCARA | 40 |
| | LAMPIRAN | 41 |
| A | Peta Taman Nasional Alas Purwo | 41 |
| B | Definisi Zona Penyangga dan Ex-Zona Penyangga Definisi Zona Penyangga dan Daerah Penyangga | 42 |

ABSTRAKSI

Bentuk interaksi antara masyarakat dan kawasan konservasi menentukan dan mencerminkan kesejahteraan kedua pihak ini. Menurut sejarah, masyarakat sekitar kawasan konservasi dianggap sebagai sebetulnya gangguan saja. Namun, kita semakin sadar akan manfaat-manfaat dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, baik dari sisi konservasi maupun kemasyarakatan.

Ketergantungan masyarakat sekitar Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) pada sumber daya alam di kawasan itu masih sangat tinggi. Bentuk interaksi yang paling sering dilakukan termasuk perburuan satwa liar, pengambilan tumbuhan, dan pengambilan hasil laut. Balai TNAP dan Perum Perhutani sudah memulai memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar, terdiri dari penyuluhan, bina cinta alam dan kader konservasi, bantuan ternak, tanaman dan peralatan seni, dan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Tetapi bantuan tersebut belum cukup efektif dalam upaya perbaikan situasi ekonomi dan konservasi.

Bisa dikatakan TNAP sekarang dalam masa peralihan. Kesadaran dan upaya untuk melibatkan masyarakat sekitar sudah muncul, tetapi pengelolaan kawasan konservasi itu dan daerah sekitarnya masih bisa dikembangkan lagi. Saran alternatif utama yang diharapkan adalah langkah-langkah segera diambil untuk mengembangkan pengelolannya menjadi pengelolaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat serta pihak-pihak lain di tingkat yang lebih tinggi.

Kata kunci: taman nasional, masyarakat, pengelolaan partisipatif

1 PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Singkat Konsep Taman Nasional di Indonesia

Pada akhir 1970an Indonesia mulai mengikuti negara-negara lain dengan mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan perlindungan dan pelestarian alam dalam bentuk yang relatif baru, yaitu bentuk *taman nasional*. Yang diikuti waktu itu adalah prinsip-prinsip dasar dari taman nasional pertama di dunia, Taman Nasional (TN) Yellowstone di AS, dan prinsip-prinsip pokok yang sudah diterima di Persidangan Umum IUCN (The World Conservation Union) pada tahun 1969.

Prinsip-prinsip itu termasuk:

- Taman nasional harus mengandung “isi” istimewa, serta keindahan alamnya masih dalam keadaan utuh.
- Adanya sistem penjagaan dan perlindungan yang efektif, dimana satu atau beberapa ekosistem secara fisik tidak diubah karena adanya eksploitasi dan pemukiman manusia.
- Kebijakan dan manajemen dipegang oleh pemerintah pusat yang mempunyai kompetensi sepenuhnya, yang harus segera mengambil langkah-langkah pencegahan atau meniadakan semua bentuk gangguan/pengrusakan terhadap ekosistem dan “isi” taman nasional itu.¹

Yang membuat susah dari awalnya dalam contoh TN Yellowstone, kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak masyarakat setempat tidak diperhatikan. Dalam rangka pencegahan semua bentuk gangguan dan pengrusakan terhadap lingkungan alam di TN Yellowstone, masyarakat setempat diusir oleh pemerintah. Kebijakan itu berasal dari atas, yaitu *top down*, dan penduduk asli dikeluarkan demi kepentingan konservasi.

¹ Soewardi, H. 1978, *Menyongsong Taman Nasional (National Park) di Indonesia*, Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam, Direktorat Jenderal Kehutanan, hal 4.

Indonesia mengikuti pola-pola pengelolaan tersebut yang didukung oleh organisasi internasional. Pada awal 1980an sebuah laporan lapangan disiapkan oleh PBB untuk Direktorat Jenderal Kehutanan. Laporan internasional itu mendukung pemikiran bahwa masyarakat sekitar harus dikelola saja tanpa dilibatkan. Menurut laporan itu, ketidakadaan rasa hormat dan simpati terhadap tujuan-tujuan konservasi oleh masyarakat sekitar kawasan konservasi bisa diperbaiki sedikit dengan pendidikan dan penyuluhan, tetapi satu-satunya solusi yang benar adalah angkatan perlindungan dan hukuman yang serius.² Dalam hal rencana pengelolaan, menurut yang ditulis waktu itu sama sekali belum ada pembicaraan bersama pemerintah lokal.³ Masyarakat umum, yang kedudukannya dibawah tingkat itu, diabaikan lagi dan tidak dianggap berperan dalam pengelolaan bahkan dari awalnya dalam perencanaan.

Memang menurut sejarah, masyarakat setempat tidak diberi suara dalam pengelolaan taman nasional. Pada awalnya dalam konsep taman nasional masyarakat setempat dianggap sebagai tidak ada, atau paling hanya sebagai sebetuk gangguan saja yang harus dihapus. Padahal, jarang ada taman nasional dimana tidak ada masyarakat setempat. Masyarakat sekitar itu yang seringkali mempengaruhi kalau keberadaan taman nasional berhasil dalam acara konservasi atau tidak. Apalagi, secara teori kelestarian ekosistem dan “isi”-nya taman nasional bagi kita semua, bagi manusia, agar dapat dilaksanakan kegiatan perataan kesejahteraan material dan spiritual.⁴ Maka, secara teoretis kebutuhan-kebutuhan masyarakat harus diperhatikan. Lagipula, secara praktis kenyataannya sama.

Kata-kata “adanya sistem penjagaan dan perlindungan yang efektif” Persidangan Umum IUCN 1969 semakin sering dipikirkan kembali. Banyak taman nasional di seluruh dunia yang sudah melaksanakan cara pengelolaan yang lebih melibatkan masyarakat karena adanya kesadaran akan manfaatnya. Keterlibatan masyarakat membantu pihak konservasi dengan menaikkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kawasan konservasi, menggunakan pengetahuan masyarakat yang mendalam tentang lingkungan alam, dan mengurangi ketergantungan

² UNDP/FAO (berdasarkan karya John MacKinnon, FAO) 1981, *National Conservation Plan for Indonesia Volume III*, laporan lapangan disediakan untuk Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam, Direktorat Jenderal Kehutanan, Bogor, bab 40, hal 3.

³ UNDP/FAO, 1981, bab 41, hal 1.

⁴ Hardjosentono, H.P. *Kata Sambutan*, dalam Soewardi, H. 1978.

masyarakat pada sumber daya alam di kawasan konservasi dengan menaikkan tingkat ekonominya. Kenaikan ekonomi itu tentu saja membantu masyarakat setempat, kalau dilibatkan mereka juga bisa ikut berperan dalam proses pengelolaan taman nasional, dan kesejahteraannya akan lebih terjamin.

Sudah lama Indonesia menghargai keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi. Pada tahun 1982, Kongres Dunia Taman Nasional (World Congress on National Parks) diadakan di Bali, dan pentingnya partisipasi masyarakat diakui dengan semangat.⁵ Pada Konferensi Anggota Konvensi Keragaman Hayati Kedua yang diadakan di Jakarta pada tahun 1995, intinya termasuk keputusan melibatkan masyarakat setempat dalam penetapan rencana kerjanya.⁶

Namun di Indonesia, seperti di seluruh dunia, peran masyarakat diakui secara resmi tetapi pelaksanaan keputusan-keputusan itu jauh lebih lambat secara praktis.

Walaupun demikian, Indonesia pun sudah mengimplementasikan pengelolaan partisipatif secara berhasil. Ada beberapa taman nasional yang sudah mendapatkan keuntungan dari keterlibatan masyarakat dengan cara yang berarti. Dua contoh yang terkenal adalah TN Bunaken di Sulawesi Utara dan TN Komodo di pulau Komodo. Di kedua taman nasional yang terkenal itu, pengelolaannya sudah berubah menjadi lebih efektif dengan melibatkan masyarakat secara resmi. Manfaatnya baik dari pihak konservasi maupun pihak kesejahteraan masyarakat sudah tampak.

1.2 Taman Nasional Alas Purwo Dalam Konteksnya

Sebagaimana bisa dilihat, keberadaan taman nasional merupakan salah satu upaya manusia yang penting dalam menciptakan dan menetapkan hubungan yang berkelanjutan antara manusia dan lingkungan alam. Di Indonesia taman nasional

⁵ Putro, H.R. 2001, *Participatory Management of National Park and Protection Forest: a New Challenge in Indonesia*, online, http://www.nourishin.tsukuba.ac.jp/~tasae/2001/Indonesia_2001.pdf diakses 01/10/2004.

⁶ Wiryono, P. *Kata Pengantar*, dalam Widianarko, B. 1998, *Ekologi dan Keadilan Sosial*, Kanisius, Yogyakarta, hal 9.

memiliki kepentingan yang sama. Bahkan hal itu sangat terlihat di negara ini, yang sekarang memiliki lima puluh taman nasional.⁷

Di Indonesia, khususnya di pulau Jawa, jumlah dan kepadatan penduduknya tinggi. Jumlah penduduk Indonesia 238.453.000 orang pada tengah tahun 2004, dan Indonesia merupakan negara berpenduduk terbanyak ke-empat di dunia.⁸ Pada tahun 2000 sekitar 59% penduduk Indonesia berada di Jawa, sehingga kepadatan penduduk di Jawa agak tinggi sekitar 951 orang per kilometer persegi.⁹ Lagipula, Indonesia memiliki keragaman hayati yang sangat tinggi. Dengan luasnya 1,3% dari luasnya daratan dunia, diperkirakan ada sekitar 17% satwa di dunia yang hidup di Indonesia.¹⁰ Kalau termasuk keragaman hayati laut, jumlah ini lebih tinggi lagi. Dengan adanya keragaman hayati, Indonesia dianggap sebagai negara terpenting kedua setelah Brasil.¹¹

Kedua aspek itu (jumlah penduduk yang banyak dan keragaman hayati yang tinggi) menunjukkan bahwa di Indonesia intensitasnya interaksi antara manusia dan lingkungan alam sangat tinggi. Apalagi pada tingkat nasional, ketergantungan masyarakat sekitar kawasan hutan juga naik seiring dengan Krisis Ekonomi selama enam tahun terakhir. Akibatnya banyak kawasan, termasuk taman nasional, dimanfaatkan secara lebih intens lagi. Walaupun Indonesia mengandung keragaman hayati yang tinggi, pemanfaatan sumber daya alam juga menyebabkan pengrusakan yang agak parah. Diperkirakan hilangnya keragaman hayati Indonesia sebesar rata-rata satu spesies setiap harinya.¹²

Angka perkiraan di atas diakibatkan penebangan oleh industri perkayuan serta pembukaan hutan untuk hunian baru. Makanya pengrusakan secepat itu lebih cenderung diakibatkan oleh aktivitas di luar Jawa, misalnya di Kalimantan. Meskipun

⁷ Departemen Kehutanan, *50 Taman Nasional di Indonesia*, online, http://www.dephut.go.id/INFORMASI/TN%20INDO-ENGLISH/tn_index.htm diakses 30/11/2004.

⁸ United States Census Bureau, *IDB Summary Demographic Data for Indonesia*, online, <http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/idbsum?cty=ID> and *IDB Countries Ranked by Population: 2004*, online, <http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/idbrank.pl> diakses 04/01/2005.

⁹ Badan Pusat Statistik, *Ulasan Singkat Nasional: Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000*, online, http://www.bps.go.id/sector/population/Pop_indo.htm diakses 04/01/2005.

¹⁰ ProFauna Indonesia, *Fakta Tentang Satwa Indonesia*, online, http://www.profauna.or.id/Indo/Fakta_satwa.html diakses 27/11/2004.

¹¹ Wiryono, 1998, hal 9.

¹² Wiryono, 1998, hal 9.

demikian, mungkin di pulau Jawa hal seperti itu sudah dilakukan pada zaman dahulu. Di Jawa kurang dari 10% luasnya daratan ditutupi hutan, dan hanya sepertiga hutan itu yang masih alami.¹³

Terdapat di semenanjung di ujung tenggara pulau Jawa, kawasan Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) mengalami perlindungan geografis alami, tetapi interaksinya masih intens dengan masyarakat. Tingkat ketergantungan masyarakat sekitar pada kawasan konservasi itu tinggi dan bentuknya macam-macam. TNAP itu berperan yang amat penting dalam pengelolaan lingkungan alam dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal, sampai tingkat nasional dan internasional.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam laporan ini diberikan garis besar keadaan lingkungan alam dan kemanusiaan di TNAP dan di daerah penyangga. Dengan menjelaskan bentuk-bentuk interaksi antara masyarakat dan kawasan konservasi dan melihat cara-cara pengelolaan sekarang ini diharapkan bisa mengidentifikasi bagaimana pengelolaannya bisa diubah dan dilanjutkan.

Secara spesifik, saya ingin menyoroti aspek-aspek pengelolaan partisipatif yang sudah ada dan bagaimana pengembangan aspek-aspek itu bisa membangun cara pengelolaan yang lebih berkelanjutan.

Hasil laporan ini memfokuskan pada pemikiran yang terkait dengan pelaksanaan dan pengembangan cara-cara pengelolaan yang partisipatif. Studi lapangan ini dapat dilanjutkan dengan pengkajian tentang bagaimana cara-cara pengelolaan partisipatif bisa dilaksanakan secara praktis.

¹³ Mahony, I. 2004, "The magic of Alas Purwo National Park," dalam *Inside Indonesia*, No. 80 Oktober – Desember 2004, IRIP, Melbourne, hal 12.

2 METODOLOGI

2.1 Metode Studi Lapangan

Waktu pengkajian untuk studi lapangan ini dilakukan pada bulan September, 2004 sampai dengan Januari, 2005.

Untuk memperoleh data primer dan beberapa data sekunder, saya tinggal dua kali di daerah Alas Purwo: pada awal bulan Oktober selama empat hari di dalam kawasan TNAP di Trianggulasi, dan pada akhir bulan Oktober sampai awal bulan November selama dua minggu di daerah penyangga di Dusun Kutorejo, Desa Kalipahit. Pada kedua kali ini dilakukan pengamatan di lapangan, wawancara formal dan informal, dan interaksi bersama masyarakat pada umumnya.

Sebagai dukungan pengumpulan data dari lapangan, dilakukan pula studi data sekunder, termasuk: buku, artikel koran, artikel majalah, laporan, monografi desa-desa sekitar TNAP, dan situs Internet. Dari semua data yang diperoleh, yaitu data primer dan sekunder, dapat dilakukan analisa kuantitatif dan kualitatif.

2.2 Kesulitan dan Keterbatasan

Studi lapangan ini dilakukan dalam waktu yang singkat, sehingga laporan ini tidaklah selengkap mungkin. Maka pengertian saya akan pengelolaan kawasan TNAP dan segala hal yang terkait dengan itu masih kurang. Saya juga bisa lebih efisien dengan menggunakan waktu. Jika memiliki waktu yang lebih banyak, memang lebih banyak orang yang mau diwawancarai. Sayang tidak ada kesempatan untuk mewawancarai petugas dari Perum Perhutani secara formal, sehingga berbagai aspek laporan ini lebih bergantung pada sumber sekunder.

Ada juga rintangan bahasa. Masyarakat sekitar TNAP banyak yang bahasa Indonesianya tidak lancar. Dan saya, bisa berbahasa Jawa sedikit-sedikit saja dan tidak bisa berbahasa Using. Walaupun selalu ada yang menjadi penerjemah di sana,

tetapi selalu ada sesuatu yang hilang dalam penerjemahannya. Dan karena bahasa Indonesia saya tidak sempurna sehingga mesti ada kesalahpahaman di lapangan.

Kalau ada yang salah dalam laporan ini saya sendiri yang bertanggung jawab. Meskipun ada kekurangan, diharapkan laporan ini bisa dianggap sebagai suatu tambahan yang berguna dalam pengembangan kawasan TNAP dan daerah sekitarnya.

3 LATAR BELAKANG

3.1 Kronologi Singkat Kawasan Taman Nasional Alas Purwo

Pada zaman penjajahan Belanda kawasan Alas Purwo telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Pada tahun 1939 kawasan itu ditunjukkan sebagai Suaka Margasatwa Banyuwangi Selatan. Setelah konsep taman nasional masuk ke Indonesia, SM Banyuwangi Selatan dimasukkan wilayah kerja Taman Nasional Baluran yang ditunjukkan pada tahun 1984. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan no. 283/Kpts-11/1992, kawasan SM Banyuwangi Selatan ditetapkan menjadi Taman Nasional Alas Purwo. Mulai pada tahun 1998, ada perdebatan resmi tentang pengelolaan zona penyangga TNAP, yang sampai sekarang masih belum diselesaikan.¹⁴

Suatu pengembangan yang lain adalah penunjukan Balai Taman Nasional Alas Purwo yang berdiri sendiri. Berarti sekarang kawasan TNAP tidak di bawah pengelolaan Balai Taman Nasional Baluran lagi.

3.2 Keadaan Umum

Geografi

Kawasan konservasi itu seluas 43.420 ha dan terletak di semenanjung Blambangang, di Kecamatan Tegaldlimo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Karena terletak di ujung tenggara pulau Jawa, wilayah barat TNAP berbatasan dengan wilayah pemukiman dan semua sisa lain dikelilingi laut, yaitu Teluk Pang Pang, Selat Bali, Samudera Indonesia, dan Teluk Grajagan.

TNAP terdiri dari empat macam zonasi, yaitu: Zona Inti (Sanctuary Zone), Zona Rimba (Wilderness Zone), Zona Pemanfaatan (Intensive Use Zone), dan Zona Penyangga (Buffer Zone). Zona inti mengandung “isi” yang harganya paling tinggi

¹⁴ Anonim. 2004, *Kronologi Pengelolaan Zona Penyangga Taman Nasional Alas Purwo*, Balai Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Lihat Lampiran A.

secara ekologi dan konservasi. Zona itu relatif jauh dari batasan kawasan konservasi dengan akses resmi yang minimum. Zona rimba berfungsi sebagai penyangga zona inti, dan pemanfaatan yang diperbolehkan hanya kegiatan penelitian, pengembangan terbatas, dan kegiatan wisata alam yang terbatas. Beberapa zona pemanfaatan terletak di dalam zona rimba di mana diperbolehkan pemanfaatan tertentu termasuk kegiatan wisata alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara teratur. Zona penyangga (definisi diberikan di Lampiran A) berfungsi secara resmi sebagai zona yang melindungi kawasan konservasi terhadap gangguan dari luarnya, dan melindungi kawasan pemukiman terhadap gangguan dari kawasan konservasi.

Secara fisik TNAP agak datar, dengan topografi yang bergelombang ringan. Gunung Lingga Manis puncak tertinggi dengan tingginya 322 mdpl. Di perbukitan terdapat puluhan goa dan beberapa air mata yang mengalir sepanjang tahun. Ada kuala, Segoro Anak, di wilayah barat dan beberapa sungai yang pada umumnya dangkal dan pendek.

Secara biasa iklimnya relatif kering, dengan rata-rata curah hujan 1000 – 1500 mm per tahun, suhu udaranya 22 – 31 derajat Celsius, dan kelembaban udara 40 – 85%.¹⁵ Semakin ke arah barat curah hujan semakin tinggi, maka di daerah penyangga curah hujan lebih tinggi. Kebanyakan hujan itu, sekitar 1000 – 3000 mm per tahun, jatuh pada musim hujan yang merupakan jangka waktu satu sampai tiga bulan.¹⁶

Biologi

Kawasan TNAP ditetapkan sebagai taman nasional sebab “isi”-nya memang istimewa. Tingkat keragaman hayati sangat tinggi. Di antara semua spesies flora, fauna dataran dan fauna laut, ada yang khas kawasan itu serta yang terancam punah.

Ada setidaknya 584 jenis tumbuhan yang sudah tercatat, tidak termasuk yang belum diketahui. Jenis hutan yang ada termasuk: hutan hujan dataran rendah, hutan bambu, hutan pantai, hutan mangrove, padang rumput, dan hutan tanaman. Hutan bambu

¹⁵ Nur Patria K., Fauzi, M., Pudjiadi, Masudah, Sulastini, D. dan Suryaningsih, R. 2003, *Buku Informasi Taman Nasional Alas Purwo*, Balai Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, hal 2.

¹⁶ Anonim. 2003, *Profil Desa/Kelurahan, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi: Profil Desa Kedungasri*, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Propinsi Jawa Timur, Lampiran 1B, hal 16.

Listiyowati, A.I. 2004, *Studi Zonasi di Taman Nasional Alas Purwo*, dalam rangka Magang CPNS Departemen Kehutanan, Balai Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, hal 2, 5.

terdiri dari belasan spesies bambu dan merupakan jenis hutan yang dominan, kira-kira 40% dari hutan yang ada. Hutan mangrove di Segoro Anak merupakan yang terluas di Jawa Timur. Hutan tanaman, pada umumnya pohon jati, terdapat di zona penyangga.¹⁷

Di antara jenis flora yang khas dan endemik TNAP termasuk sawo kecik (*Manilkara kauki*) dan bambu manggong (*Gigantochloa manggong*).¹⁸ Bambu manggong itu adalah emblem flora Kabupaten Banyuwangi.

Jenis hutan yang tersebut merupakan habitat ratusan spesies fauna. Terdapat 31 spesies mamalia, termasuk: macan tutul (*Panthera pardus*), kucing bakau (*Prionailurus bengalensis*), ajag (*Cuon alpinus*), banteng (*Bos javanicus*), rusa (*Cervus timorensis*), kijang (*Muntiacus muntjak*), lutung (*Trachypithecus auratus*), kera abu-abu (*Macaca fascicularis*), dan babi hutan (*Sus scrofa*). Baik ajag maupun banteng (anjing liar dan sapi liar) terancam punah.

Banyak juga burung yang terdapat di TNAP. Di antara spesies migran yang berasal dari Australia terdapat jenis terkenal misalnya pelikan (*Pelicanus consipillatus*). Antara sisanya dari 236 jenis burung terdapat: merak (*Pavo muticus*), ayam hutan (*Gallus gallus*), kangkareng (*Antracoceros coronatus*), cekakak jawa (*Halcyon cyanoventris*), elang ular (*Spilornis cheela*), dan elang laut perut putih (*Haliaeetus leucogaster*).¹⁹

Sebanyak 20 spesies reptil yang sudah teridentifikasi termasuk: buaya muara (*Crocodylus porosus*) dan biawak (*Varanus salvator*).²⁰ Ada juga spesies amphibi termasuk spesies kodok dan kura-kura.

Karena kawasan konservasi itu kawasan dataran maka tidak termasuk sebagian besar fauna laut yang tinggi keragamannya, tetapi beberapa jenis penyu mendarat di pantai-pantai TNAP. Ada empat spesies penyu yang terdapat pada musim bertelur dan

¹⁷ Nur Patria K. *dkk*, 2003, hal 3, 18.

¹⁸ Departemen Kehutanan, *Taman Nasional Alas Purwo*, online, http://www.dephut.go.id/INFORMASI/TN%20INDO-ENGLISH/tn_alaspurwo.htm diakses 01/12/2004.

¹⁹ Nur Patria K. *dkk*, 2003, hal 4, 13.

²⁰ Nur Patria K. *dkk*, 2003, hal 4.

penetasannya, yaitu: penyu abu-abu (*Lepidochelys olivacea*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), penyu belimbing (*Dermochelys coreacea*), dan penyu hijau (*Chelonia mydas*). Semua spesies tersebut terancam punah.

Obyek Wisata

Di dalam kawasan TNAP ada beberapa obyek wisata. Yang berikut adalah beberapa dari obyek wisata yang terdapat di sana.

Pura Giri Luhur Selaka adalah pura peninggalan sejarah, dan ada sebuah pura lain yang baru dibangun pada tahun 1997 yang masih sering dikunjungi dan dipakai oleh umat Hindu. Tidak hanya umat Hindu Kabupaten Banyuwangi yang berkunjung ke dua pura tersebut, tetapi banyak juga dari tempat-tempat lain di Jawa Timur dan Bali. Ada ribuan orang yang datang setiap upacara Pagerwesi. *Pura Giri Luhur Selaka* terletak di kawasan TNAP karena hutan di sana merupakan yang dianggap paling sakral oleh umat Hindu Indonesia.

Tidak jauh dari sana di *Sadengan* ada tempat parkir dan menara yang disediakan untuk menyaksikan satwa liar. *Sadengan* merupakan padang rumput luas 80 ha, ditanami dengan rumput untuk memastikan keamanan banteng, rusa, kijang, babi hutan dan merak, antara satwa lain. Setiap hari satwa liar kelihatan di tempat tersebut, khususnya pada waktu agak pagi atau sore.

Sebagian besar penyu yang mendatangi TNAP mendarat di pantai *Ngagelan* untuk bertelur. Di sana ada tempat penetasan penyu untuk melindungi penyu sebelum dan setelah penetasan. Ada beberapa pegawai TNAP yang menjaga tempat penetasan di *Ngagelan* dan menggantikan air untuk penyu yang belum cukup besar untuk dilepaskan. Pantai tersebut merupakan baik tempat konservasi penyu maupun potensi obyek wisata.

Pantai-pantai Teluk Grajagan merupakan obyek wisata yang sering dikunjungi. Pantai *Trianggulasi* yang paling dekat pintu masuk Pos Rowobendo, dan terletak di tengah pantai Teluk Grajagan. Di sana ada penginapan cukup untuk sekitar 30 orang, lengkap dengan dapur dan kamar mandi. Atraksinya termasuk pantai berpasir putih yang indah

khususnya pada waktu matahari terbenam, hutan pantai, dan satwa liar yang sering kelihatan seperti kera abu-abu, rusa, dan burung-burung.

Terletak ke arah timur ada pantai *Pancur*. Di sana ada tempat untuk *camping*, kamar mandi, serta warung yang kadang buka. Ada sungai yang mengalir sepanjang tahun melalui pantai yang agak terjal, dan pancuran itu yang memberi namanya ke pantai tersebut. *Pancur* merupakan pintu masuk ke Plengkung.

Goa Istana tidak jauh dari Pancur. Goa itu dan goa-goa lain terkenal karena dianggap sakral. Orang-orang ke sana untuk bersemedi dan melakukan kegiatan-kegiatan lain terkait dengan dunia supernatural. Air mata dari *Goa Istana* yang mengalir ke laut melalui Pancur.

Plengkung, atau mungkin lebih terkenal dengan nama *G-Land*, merupakan salah satu tempat berombak yang paling bagus di dunia untuk *surfing* (selancar). Ada empat perusahaan (yang satu tutup sementara) di mana para pengunjung bisa menginap. Biasanya orang asing yang datang ke sana untuk berselancar, dan biasanya transportasinya dari Bali melewati laut.

Ada juga beberapa potensi obyek wisata yang belum dikembangkan. Tempat-tempat itu termasuk *Kayu Aking* (atau *Payaman*), *Perpat*, dan *Slenggrong* (atau *Teluk Banyu Biru*), di mana dapat dilakukan mandi di laut, menyelam, atau kegiatan-kegiatan perairan lain di laut yang tenang.

Sosial, Ekonomi dan Budaya

Ada 10 desa yang berbatasan langsung dengan TNAP. Total jumlah penduduk di ke-10 desa tersebut lebih dari 80.000 orang.²¹ Walaupun di pedesaan, kepadatan penduduk tinggi berkisar dari 698 jiwa/km² di Wringinputih sampai 4318 jiwa/km² di Kedungrejo.²²

²¹ Sulastriningsih, D. 2004, *Pengelolaan Daerah Penyangga Sebagai Banteng Pertahanan Kawasan Konservasi*, dalam rangka Magang CPNS Departemen Kehutanan, Balai Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, hal 12.

²² Listiyowati, 2004, hal 7.

Masyarakat sekitar TNAP secara umum mata pencahariannya bertani, buruh tani, dan nelayan. Para nelayan sebagian besar tinggal di daerah Muncar, salah satu pelabuhan ikan yang paling besar di Jawa, dan di daerah Grajagan. Aktivitas tani termasuk menanam padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, dan perkebunan lain. Ada juga peternakan, misalnya sapi dan kambing, dan perikanan. Orang menjadi buruh tani kalau tidak memiliki tanah sendiri. Mata pencaharian selain ketiga tersebut yang utama termasuk: industri kecil (misalnya tempe, gula jawa, batu bata, mebel, kerajinan), pegawai negeri sipil, pekerja Perum Perhutani, dan pemanfaatan sumber daya alam TNAP.

Masyarakat daerah penyangga TNAP memeluk berbagai agama, yang utama Islam dan Hindu. Sistem kepercayaan kejawen dan tradisi-tradisi Jawa lain masih kuat di sana, sehingga masyarakat sana bisa digolongkan sebagai masyarakat Jawa tradisional. Juga dilaksanakan bertapa, bersemedi dan selamatan-selamatan lain yang berkaitan dengan pencarian ketenangan bathin.²³

Hubungannya di antara keadaan umum di atas akan dijelaskan di bab yang berikut. Maka hal-hal penting yang muncul dari interaksi antara masyarakat setempat dan lingkungan fisik diterangkan.

²³ Nur Patria K. *dkk*, 2003, p5

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tingkat Ketergantungan Tinggi Terhadap Kawasan Taman Nasional Alas Purwo

Interaksi antara masyarakat dan TNAP intens karena ketergantungan masyarakat pada sumber daya alam masih tinggi. Sumber daya alam berlimpah-limpah dan bermacam-macam, dan pemukiman berbatasan langsung dengan kawasan itu. Tingkat ekonomi di daerah penyangga rendah, dan pekerjaan di sana sering tidak stabil. Beberapa tradisi juga bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam.

Seperti disebut di atas, keragaman hayati di TNAP sangat tinggi, baik flora maupun fauna. Sebab itu spesies-spesies yang terdapat di sana bisa dimanfaatkan dengan banyak cara untuk bermacam gunanya. Keberadaan taman nasional memastikan keadaan keragaman itu tetap tinggi.

Banyak dari masyarakat yang tergantung pada sumber daya itu karena ekonominya rendah. Sebagian besar masyarakat sekitar mata pencahariannya aktivitas-aktivitas pertanian. Karena parahnya musim kemarau di daerah itu dan ketidakcukupan fasilitas irigasi, banyak aktivitas pertanian yang dikurangi atau diperhentikan sementara pada musim itu. Curah hujan tidak mencukupi kebutuhan air banyak aktivitas pertanian selama musim kemarau. Tanah di daerah penyangga juga mempunyai sifat fisik yang kurang baik. Berarti para petani tidak tentu memiliki penghasilan yang cukup untuk dimakan sendiri serta tidak mempunyai hasil lebih untuk dijual. Tidak tentu juga para buruh tani, yang tidak memiliki tanah, tetap bekerja selama musim kemarau.

Karena kepadatan penduduk yang tinggi, sudah banyak orang memiliki tanah yang sempit saja atau tidak memiliki sama sekali. Contohnya pada tahun 2002 di Desa Kalipahit, dari 4953 orang hanya 495 yang memiliki tanah, dan hanya 198 orang yang tanah miliknya 0,1 ha atau lebih.²⁴ Apalagi jumlah orang yang sama sekali tidak memiliki tanah atau memiliki yang sempit saja semakin bertambah. Oleh karena

²⁴ Anonim. 2002, *Profil Desa/Kelurahan, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi: Profil Desa Kalipahit*, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Propinsi Jawa Timur, hal 19.

jumlah penduduk yang semakin bertambah seperti tanah yang ada semakin menyempit. Makanya lebih banyak orang yang biasa mengerjakan pertanian terpaksa mencari ekonomi di luar bidang itu.

Pertambahan penduduk ini dianggap sebagai salah satu ancaman utama terhadap lingkungan alam TNAP. Baik pegawai maupun pegawai pensiunan TNAP mempertalikan kenaikan jumlah penduduk di daerah penyangga dengan gangguan dan pengrusakan yang berakibat terus dari pemanfaatan sumber daya alam.²⁵ Demikian, seperti akibat jumlah penduduk yang naik itu sudah relatif lama diketahui oleh orang di sana. Pertambahan terus-menerus ini juga menyebabkan upaya pembinaan daerah penyangga dilaksanakan TNAP dan bantuan lain terus berusaha menyusul.

Kenaikan jumlah penduduk membuat lebih buruk situasi ketidakstabilan pekerjaan. Hal ini, jika pekerjaan tidak stabil, dikatakan banyak orang sebagai salah satu alasan ekonomi daerah penyangga rendah. Banyak orang yang tidak bisa bertahan hidup dengan penghasilan pertanian saja, sehingga terpaksa mencari pekerjaan yang lain. Bahkan kalau masyarakat tertentu cukup beruntung dengan memiliki tanah, tidak berarti penghasilannya dari aktivitas pertanian saja cukup untuk kehidupannya.

4.2 Bentuk-Bentuk Penghasilan

Karena mata pencaharian utama seperti pertanian tidak mencukupi, masyarakat terpaksa mencari pilihan-pilihan alternatif. Pilihan lain termasuk berbagai macam bentuk pemanfaatan sumber daya alam di TNAP sampai masuk ke zona rimba dan zona inti. Banyak dilakukan perburuan satwa liar, pengambilan tumbuhan dan pengambilan hasil laut. Secara resmi masyarakat boleh memanfaatkan sumber daya di zona penyangga, misalnya melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Yang berikut adalah penjelasan terpilih untuk menggambarkan manfaat-manfaat beberapa sumber daya alam dan bagaimana cara pemanfaatan.

²⁵ Pak Joe, petugas pensiunan Balai Taman Nasional Alas Purwo, wawancara 30/10/2004.
Mas Cipto, petugas Polisi Hutan Balai Taman Nasional Alas Purwo, wawancara 08/11/2004.

Perburuan Satwa Liar

Dengan keadaan keragaman hayati yang tinggi, banyak spesies satwa liar yang dapat dimanfaatkan di TNAP. Perburuan, peracunan, dan penjeratan sering dilakukan untuk berbagai macam alasan.

Banteng

Populasi banteng adalah salah satu aset TNAP. Tetapi selain potensi konservasi dan wisata, keberadaan banteng juga merupakan kesempatan perburuan yang baik. Permasalahan utama kelestarian satwa yang paling besar di TNAP itu adalah penjeratan banteng oleh masyarakat dengan invasi padang penggembalaan dan memakai jebakan-jebakan dan senjata api.²⁶

Banteng di Indonesia lebih senang dalam habitat hutan sekunder yang berakibat dari penebangan dan api.²⁷ Memang hutan produksi di zona penyangga dan daerah penyangga digolongkan sebagai hutan sekunder yang ditebang secara relatif reguler. Cara pengelolaan hutan itu juga memakai api untuk membakar tumbuhan tingkat bawah supaya pohon produksi lebih gampang ditebang. Lagipula, kegiatan-kegiatan lain termasuk penanaman tanaman yang disukai banteng. Jenis tanaman pertanian yang diusahakan peserta PHBM di zona penyangga, seperti jagung, kacang tanah dan ketela, menarik satwa liar ke luar dari hutan lindung.

Banteng juga tertarik oleh daerah padang penggembalaan yang sangat dekat dengan kawasan TNAP. Diperkirakan daerah tersebut dengan nama Sumber Gedang seluas 200 ha.²⁸ Ada masalah kekurangan makanan di Sadengan yang seluas 80 ha. Apalagi Sumber Gedang merupakan daerah di dalam daerah jelajah (*home range*) banteng.

²⁶ Suryanta, J. 2004, *Kemungkinan Penetapan Blok Sumber Gedang Sebagai Padang Penggembalaan Untuk Pelestarian Banteng (Bos javanicus d'Alton) di Taman Nasional Alas Purwo*, dalam rangka Magang CPNS Departemen Kehutanan, Balai Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, hal 16.

²⁷ Bison, Buffalo, and Cattle Taxon Advisory Group, Banteng, online, http://www.csew.com/cattletag/Cattle%20Website/Fact_Sheets/Banteng/banteng.htm diakses 27/11/2004.

²⁸ Suryanta, 2004, hal 14.

Perburuan, peracunan, penekanan aktivitas dan hilangnya daerah jelajahnya merupakan ancaman terhadap banteng yang terjadi di TNAP.²⁹

Perburuan liar meningkat kalau musim orang melaksanakan hajatan seperti acara pernikahan, karena harga dagingnya banteng yang jauh lebih murah dibanding dengan harga daging sapi.³⁰ Ada juga yang mendapatkan satwa liar untuk dijual sebagai hiasan. Pada awal November 2004, sudah ditangkap beberapa orang pemburu yang memiliki kepala banteng yang disimpan di rumahnya untuk dijual nanti. Demikian, aktivitas perburuan tersebut masih dilakukan sampai dengan sekarang ini.

Satwa yang lain

Selain banteng, pada umumnya perburuan liar dilakukan terhadap burung, babi hutan, rusa, kera abu-abu, lutung dan penyu.³¹ Para pemburu yang baru ditangkap pada November yang lalu, selain kepala banteng juga memiliki kepala rusa dan kijang, serta seekor elang dan ular. Semua satwa tersebut dimaksudkan untuk dijual di pasar gelap. Dengan adanya hukuman perburuan liar sebesar Rp. 100 juta atau 5 tahun di penjara, bisa dikatakan harga satwa itu kalau dijual di pasar gelap cukup tinggi untuk mengganti kerugian yang sangat tinggi itu.³²

Satwa liar yang masih hidup juga ditangkap untuk dipelihara di rumah atau dijual, terutama burung. Perburuan buaya juga dilakukan, sehingga buaya yang tinggal di kuala-kuala di antara Trianggulasi dan Plengkung terancam dengan perburuan oleh masyarakat.³³

²⁹ Suryanta, 2004, hal 16.

³⁰ Suryanta, 2004, hal 18.

³¹ Permana, H. 2004, *Pola Umum Gangguan Hutan di Balai Taman Nasional Alas Purwo*, dalam rangka Magang CPNS Departemen Kehutanan, Balai Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, hal 30.

³² Mas Cipto, wawancara 08/11/2004.

³³ Mas Cipto, wawancara 03/11/2004.

Pengambilan Tumbuhan

Keragaman tumbuhan di TNAP tinggi dengan bermacam-macam kegunaannya yang juga sangat tinggi. Oleh karena itu sudah lama masyarakat memanfaatkan potensi tumbuhan di kawasan itu.

Bambu

Di TNAP ada belasan jenis bambu, bahkan hutan bambu merupakan jenis hutan yang dominan. Pengambilan bambu dilakukan di seluruh kawasan, paling sering di wilayah barat yang dekat wilayah pemukiman dan zona penyangga. Bambu mempunyai banyak guna. Ada yang digunakan untuk membuat bangunan, misalnya untuk kasau, dan untuk membuat mebel. Pagar-pagar di sekitar perkebunan buah-buahan dibuat dari bambu, serta berbagai macam perangkap ikan seperti bagang.³⁴ Dikatakan ada juga yang memanfaatkan bambu kuning untuk membuat tongkat sihir.³⁵

Pemanfaatan bambu, selain bermacam-macam gunanya, dilakukan dengan sering. Pada waktu saya tinggal di Desa Kutorejo, setiap hari rumah kepala desa dilewati banyak orang yang membawa potong-potong bambu yang baru diambil dari taman nasional. Di beberapa tempat, banyak dijumpai beraneka jenis bambu yang berlimpah dan memiliki tingkat regenerasi yang tinggi.³⁶ Makanya bambu merupakan sumber daya alam yang sering dimanfaatkan dengan banyak gunanya. Namun dengan memanfaatkan bambu, banyak orang masuk ke zona rimba dan inti di mana secara teoretis kegiatan seperti itu seharusnya tidak dilakukan.

Rotan

Seperti bambu, rotan juga dimanfaatkan di zona rimba dan inti. Gunanya termasuk digunakan membuat mebel dan kerajinan. Karena melimpah dan gunanya banyak, rotan juga sudah lama dan masih sering dimanfaatkan. Antara lain, kerajinan dan mebel merupakan industri kecil yang penting dan sudah lama berada di sekitar TNAP.

³⁴ Listiyowati, 2004, hal 17.

³⁵ Kris, tokoh masyarakat Gintangan, wawancara 02/10/2004.

³⁶ Listiyowati, 2004, hal 17.

Di Desa Kalipahit, misalnya, pada tahun 2002 industri kecil kerajinan dimiliki 234 dari 1480 rumah tangga yang ada.³⁷

Kayu Bakar

Pengambilan kayu bakar juga merupakan pemanfaatan sumber daya alam yang sering dilakukan di TNAP. Dari 1480 rumah tangga yang ada di Desa Kalipahit, 986 atau 67% yang memakai kayu sebagai bahan bakar.³⁸ Karena Desa Kalipahit berbatasan langsung dengan TNAP berarti lebih dari separuh jumlah penduduknya tergantung pada pengambilan kayu bakar dari kawasan itu. Kayu bakar diambil untuk langsung dipakai di rumah, dan juga ada yang dijual. Maka kayu bakar merupakan hasil yang berguna di rumah atau proses pengambilannya bisa merupakan sebetulnya pekerjaan.

Ada yang menegaskan pendapat bahwa pengambilan kayu bakar, yang sebenarnya ilegal, bukan pekerjaan yang menyenangkan. Malah dilakukan hanya kalau dipaksa karena ketidakadaan pekerjaan lain untuk sementara.³⁹ Di daerah penyangga sering dilihat orang yang membawa beban sepeda ontel, atau kendaraan lain yang penuh dengan kayu bakar. Lebih banyak orang memanfaatkan kayu bakar di wilayah di dalam TNAP yang lebih dekat wilayah pemukiman, misalnya di hutan di antara Pos Rowobendo sampai muara Segoro Anak, atau di zona rimba yang berbatasan dengan zona penyangga.

Pengambilan Hasil Laut

TNAP terletak di semenanjung yang dikelilingi lingkungan laut yang sangat subur. Ada banyak kesempatan untuk memanfaatkan hasil biota laut. Dalam beberapa proses pemanfaatan bisa terlibat sejumlah besar orang.

³⁷ Anonim. 2002, hal 17.

³⁸ Anonim. 2002, hal 51.

³⁹ Pemilik Gerandong, Dusun Airpa, Desa Kendalrejo, wawancara 02/11/2004.
Warga Dusun Kutorejo, Desa Kalipahit, wawancara 31/10/2004.

Kermis

Contoh yang bagus adalah pengambilan kermis. Kermis itu sejenis karang kecil yang terdapat di pantai-pantai Teluk Grajagan. Jumlah yang paling banyak ada di daerah pantai Ngagelan sampai Segoro Anak. Kermis itu dibuat menjadi makanan temak biasanya untuk sapi atau ayam. Banyak sekali orang terlibat dalam “industri mini” pengambilan kermis itu, dan pada musimnya banyak yang pendapatannya hanya tergantung dari hasil pekerjaan itu. Para orang yang mencari kermis itu berjalan dari desa ke pantai setelah menyeberang Segoro Anak. Di pantai setiap orang memiliki tempat kecil di pasir di mana kermis, setelah diambil dari laut, bisa dikeringkan selama dua hari sebelum dimasukkan ke dalam sak besar. Kemudian sak-sak itu dibawa ke tepi Segoro Anak di mana ada para orang lain yang membawakan kermis memakai perahu menyeberang Segoro Anak. Di tepi lain para pemilik gerandong, sejenis kendaraan ilegal, mengangkut kermis sampai ke desa untuk dijual oleh para orang lain lagi. Orang-orang pengedar itu yang membeli kermis untuk dijual di desa, dan mereka yang membayar orang yang memegang kermis sebelumnya.

Pengambilan kermis memang industri mini, tetapi tidak stabil juga. Bagi orang yang langsung mengambil kermis ada berbagai faktor yang menentukan tingkat pendapatannya. Lain lokasi di pantai lain jumlah kermis. Di beberapa lokasi satu orang bisa mendapat sampai sepuluh sak sehari. Di lokasi lain satu orang mendapat paling banyak dua sampai lima sak sehari. Pengambilannya juga tergantung pada pasang surut laut. Pada waktu pasang mati kermis tidak bisa diambil. Selain itu, waktu dan jumlah bayaran tidak tentu. Biasanya orang tidak menerima bayaran setiap hari, tetapi harus menunggu si pengedar, mungkin sekali sebulan. Apalagi dari musim ke musim harga kermis bisa naik turun secara drastis. Misalnya, pada tahun 2003 orang pengambil dibayar 6 ribu per sak, dan pada tahun 2004 itu sudah naik menjadi 12 ribu.⁴⁰ Pasti tidak ada yang mengeluh tentang kenaikan sedrastis itu, tetapi karena tidak stabil bisa ada akibat yang terbalik dan sangat terasa.

Yang mempengaruhi semua orang yang terlibat dalam pengambilan kermis adalah musimnya. Kermis hanya ada pada musim kemarau, kebetulan pada waktu yang sama

⁴⁰ Orang-orang pengambil kermis, di tempat pengambilan kermis dekat Ngagelan, wawancara 04/10/2005.

banyak aktivitas pertanian berkurang. Tetapi kermis tidak selalu ada pada setiap musim kemarau. Makanya banyak orang mencari penghasilan tambahan itu karena pekerjaan lain tidak stabil, tetapi pengambilan kermis tidak stabil juga.

Kuwuk

Di daerah pantai sekitar Plengkung dan ke arah timur lagi banyak pemanfaatan kuwuk. Kuwuk itu hasil laut yang digunakan membuat perhiasan seperti kalung atau gelang. Dari pintu masuk TNAP sampai daerah itu sekitar 12 kilometer lebih, dan juga dari desa-desa lebih jauh lagi. Oleh sebab itu kegiatan pengambilan kuwuk cukup berat. Ada yang tinggal satu minggu di daerah itu mengambil kuwuk, dan satu minggu di desa.⁴¹ Pengambilan kuwuk juga bergantung pada pasang surut laut, dan harus dilakukan pada waktu air surut. Seperti dengan kermis, pengambilannya tidak bisa dilakukan pada waktu pasang mati.

Kepiting dan Udang

Wilayah Segoro Anak dekat dengan wilayah pemukiman. Karena itu sudah lama masyarakat memanfaatkan potensi perairan itu, bahkan lama sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai TNAP. Penghasilan lain adalah penangkapan kepiting dan udang. Perangkap-perangkap kelihatan di sepanjang Segoro Anak. Kegiatan pemanfaatan potensi perairan di Segoro Anak, sama dengan pencarian kerang kermis, bisa disebut pemanfaatan tradisional karena sudah lama dilakukan oleh masyarakat.⁴²

Pemanfaatan Zona Penyangga

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Salah satu fungsi pokok zona penyangga adalah sebagai zona di mana sumber daya alam yang ada bisa dimanfaatkan oleh masyarakat supaya tidak masuk ke zona rimba dan zona inti. PHBM dilaksanakan Perum Perhutani di zona penyangga dengan tujuan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi. Sebagai semacam bayaran

⁴¹ Orang pengambil kuwuk, Dusun Purworejo, Desa Kalipahit, wawancara 07/11/2004.

⁴² Listiyowati, 2004, hal 17.

untuk pekerjaannya yaitu menanam dan mengelola pohon produksi, masyarakat boleh memanfaatkan petaknya dengan menanam tanaman pertanian. Biasanya selama lima atau enam tahun tanah itu boleh dimanfaatkan sebelum pohon produksinya sudah menjadi terlalu besar. Ada masyarakat yang setiap hari berjalan dari desa ke petaknya, dan ada yang tinggal di dalam zona penyangga supaya lebih dekat dengan petaknya.

Pemanfaatan Lain

Pada waktu penjarangan dan penebangan hutan produksi ada masyarakat yang mengikuti bekerja untuk Perum Perhutani. Para pekerja itu dibayar upah oleh Perum Perhutani. Pekerjaan tersebut tidak reguler tetapi hanya dengan sistem borongan saja.

Selain pekerjaan untuk Perum Perhutani menanam tanaman pertanian, pemanfaatan sumber daya lain di zona penyangga termasuk pengambilan pisang dan penebangan liar. Di petak-petak di antara pohon produksi sering ditanam pohon pisang. Ada orang yang mengelilingi zona penyangga naik sepeda motor mencari pisang untuk dijual. Mereka membeli pisang dari penanam yang mengikuti PHBM, lalu pisangnya dijual, sering untuk dibawa ke Bali.

Penebangan liar di zona penyangga paling sering dilakukan di daerah hutan mangrove. Hutan mangrove yang terdapat di zona penyangga seluas 114,3 ha.⁴³ Kayu bakau dari hutan tersebut ada banyak guna, termasuk dibuat menjadi barang-barang rumah tangga. Pernah dilakukan juga penjarahan kayu di hutan produksi Perum Perhutani kurang lebih 500 ha pada tahun 1999 sampai 2001. Pada tahun berikutnya dilakukan reboisasi melalui PHBM.⁴⁴

Okupasi Kawasan Taman Nasional Alas Purwo

Selain masuk ke kawasan TNAP sementara dengan tujuan pemanfaatan sumber daya alam, ada masyarakat yang melakukan penyerobotan lahan, atau okupasi, untuk mendapat lahan lebih luas untuk dikerjakan. Aktivitas ilegal itu telah dilakukan di daerah Kayu Aking dan di dekat Desa Grajagan. Di bagian zona penyangga yang

⁴³ Listiyowati, 2004, hal 19.

⁴⁴ Listiyowati, 2004, hal 19.

berbatasan dengan Kayu Aking banyak orang tinggal di sana supaya lebih dekat petaknya dalam program PHBM. Karena dekat zona rimba sering terjadi okupasi lahan di dalam zona itu untuk meluaskan lahan yang bisa dikerjakan.⁴⁵ Di zona rimba yang berbatasan dengan Desa Grajagan juga, sudah terjadi okupasi seluas 10 ha oleh masyarakat setempat.⁴⁶ Kedua kasus okupasi tersebut belum diselesaikan meskipun sudah ada upaya penyelesaian terhadap okupasi di blok Grajagan.

4.3 Akibat-Akibat Pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Alas Purwo

Gangguan Secara Ekologi

Secara nyata banyak bentuk pemanfaatan mengancam integritas ekologi lingkungan TNAP. Ada beberapa spesies yang terancam punah, termasuk banteng dan ajag. Bentuk-bentuk pengambilan kayu secara besar-besaran merusak habitat fauna lain.

Kehilangan Habitat

Dengan ketergantungan yang sangat tinggi pada pemanfaatan tumbuhan seperti bambu dan kayu bakar, terjadi kehilangan habitat secara kualitas dan kuantitas. Kejadian penyerobotan lahan (okupasi) juga menghilangkan habitat spesies-spesies di TNAP.

Seperti disebut di atas, banyak sekali masyarakat yang tergantung pada pengambilan tumbuhan seperti bambu dan kayu bakar. Bentuk-bentuk pemanfaatan itu memiliki cara pengelolaan sendiri sampai tingkat tertentu. Hutan bambu berlimpah dan sering memiliki tingkat regenerasi yang tinggi. Makanya, walaupun sering dimanfaatkan hutan bambu lebih ulet terhadap gangguan daripada jenis hutan lain. Dalam pengambilan kayu bakar ada tingkat kepekaan umum masyarakat bahwa pohon tidak boleh ditebang tetapi kayu yang sudah jatuh boleh diambil.⁴⁷

⁴⁵ Listiyowati, 2004, hal 14.

⁴⁶ Listiyowati, 2004, hal 12.

⁴⁷ Pemilik Gerandong, wawancara 02/11/2004.

Walaupun begitu, gangguan tersebut ada efeknya. Zona rimba sering dimasuki masyarakat yang mengambil tumbuhan itu, yang mengurangi kualitas dan luasnya habitat burung-burung, dan pengambilan kayu dari tanah menghilangkan habitat makhluk yang tinggal di tanah seperti ular, biawak, dan mangsanya satwa ini dan elang.

Sebagai bisa dilihat, keberadaan masyarakat dan kegiatannya di dalam taman nasional mengganggu satwa liar dan merusak habitatnya. Oleh karena itu, jelas penyerobotan juga mengakibatkan efek yang sama. Okupasi lahan di dalam zona rimba yang sudah terjadi di Kayu Aking dan dekat Desa Grajagan. Dengan dilakukan penebangan, dikerjakan lahan yang diokupasi, atau keberadaan manusia itu saja, berarti habitat satwa liar di dalam zona rimba luasnya dikurangi dan menjadi rusak.

Spesies yang Terancam Punah

Lebih dari kehilangan habitat lokal saja, ada satwa yang terancam punah secara sedunia. Satwa itu, yang paling menonjol banteng dan ajag, diganggu oleh kegiatan masyarakat sampai efek-efek yang parah sangat mungkin terjadi. Dengan kehilangan spesies apapun menyebabkan adanya kehilangan salah satu komponen ekosistem.

Salah satu kebanggaan atau *icon* TNAP adalah banteng, yang merupakan atraksi pariwisata. Kalau datang ke Sadengan, khususnya pada waktu agak pagi atau sore, pasti ada banteng yang terlihat. Tetapi lebih dari itu, populasi banteng TNAP merupakan salah satu populasi yang paling besar dan stabil di dunia. Di TNAP ada sekitar 60 ekor. Hanya enam atau delapan populasi banteng di dunia yang lebih banyak dari 50 ekor, dan diperkirakan jumlah banteng di dunia sekitar 5000 sampai 8000 ekor.⁴⁸ Makanya banteng terdaftar di Daftar Merah (Red List) IUCN dengan status terancam punah.⁴⁹

Walaupun populasi banteng di TNAP relatif stabil tetap ada masalah dan ancaman. Permasalahan makanan dan air yang tidak mencukupi, yaitu kekurangan di Sadengan,

⁴⁸ Bison, Buffalo, and Cattle Taxon Advisory Group, online, 27/11/2004.

⁴⁹ IUCN Red List of Threatened Species, *Species Information: Bos Javanicus*, online, <http://www.redlist.org/search/details.php?species=2888> diakses 04/01/2005.

berarti banteng semakin sering mencari kebutuhan tersebut di luar kawasan konservasi. Oleh karena itu perburuan, peracunan dan penjeratan banteng oleh masyarakat lebih gampang dilakukan. Perburuan sering dilakukan sehingga populasinya mudah dikurangi. Kalau populasi sebanyak 60 ekor, maka kehilangan satu dua ekor setiap kali perburuan berhasil merupakan kehilangan 1,7% sampai 3,3% populasinya. Hilangnya sebesar itu akan sangat terasa.

Pemanfaatan potensi banteng dengan perburuan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi populasi banteng. Tetapi aktivitas yang tidak terkontrol itu mengancam upaya kelestarian alam dan, secara spesifik, masa depan banteng itu.

Terancam juga adalah satwa yang tergantung pada banteng, yaitu ajag. Di antara mangsa utama ajag di Jawa adalah rusa, kijang dan banteng. Walaupun ada ketakutan populasi lokal banteng akan menjadi punah karena dimakan ajag, sebenarnya populasi ajag yang “hilang” setelah jumlah banteng yang ada tidak mencukupi. Oleh karena perburuan liar yang mempengaruhi jumlah banteng, maka dipengaruhi juga adalah jumlah ajag. Memang penipisan jumlah mangsanya merupakan salah satu ancaman utama terhadap ajag, serta kehilangan dan perubahan bentuk habitat ajag maupun mangsanya.⁵⁰

Akibat Non-Fisik

Dari awalnya, sudah lama sebelum ditetapkan sebagai taman nasional, daerah Alas Purwo terkenal dengan suasana yang angker dan keramat. Menurut mitos, pertama kalinya tanah muncul dari laut itu terjadi di sana, sebab itu dinamakan *Hutan Pertama*, atau *Alas Purwo* dalam bahasa Jawa. Dalam kebatinan, atau kejawen, Alas Purwo dipuja sebagai tempat di mana dunia supernatural sangat kuat. Dikatakan dunia supernatural dan dunia alam di sana susah dibedakan. Tingkat keragaman hayati yang tinggi merupakan salah satu alasan Alas Purwo dianggap angker dan keramat. Orang yang percaya akan keberadaan roh di dalam pohon, batu, sungai, air mata, dan

⁵⁰ Durbin, L.S., Venkataraman, A., Hedges, S. Dan Duckworth, W. 2004, “Chapter 8.1: Dhole Cuon Alpinus,” hal 210-222, dalam Sillero-Zubiri, C., Hoffmann, M. dan Macdonald, D.W. (redaksi) 2004, *Canids: Foxes, Wolves, Jackals and Dogs. Status Survey and Conservation Action Plan*, IUCN/SSC Canid Specialist Group, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, online, <http://www.canids.org/cap/CANID6.pdf> diakses 27/11/2004, hal 214, 216-217.

dikatakan orang itu bisa berbentuk satwa liar.⁵¹ Setiap tahun pada hari-hari tertentu, misalnya pada Tahun Baru Jawa, ratusan umat dari semua agama datang ke Alas Purwo karena kekuatan supernatural yang ada.

Tetapi, dengan kehilangan satwa liar atau spesies lain sebagai akibat pemanfaatan yang intensif, Alas Purwo sudah mulai menjadi tidak dianggap angker lagi. Walaupun masih banyak masyarakat menganggap Alas Purwo sebagai anker dan keramat, juga ada yang tidak percaya lagi sebab perburuan liar dan pemanfaatan tumbuhan dilakukan dengan semakin sering. Hal itu disebabkan oleh kehilangan spesies dan fakta Alas Purwo sering dimasuki orang dengan tujuan pemanfaatan fisik. Dan juga kalau semakin hilang kepercayaan itu, semakin sering dilakukan perburuan liar dan sebagainya.

Pengambilan rumput liar juga merupakan pemanfaatan yang efek fisiknya tidak begitu parah tetapi ada akibat non-fisik yang bisa disebut parah. Pengambilan rumput liar itu tidak merupakan penghasilan tambahan atau kebutuhan hidup, malah diambil untuk ditanam kembali di halaman rumah sebagai tumbuhan hias. Pada akhir minggu pengunjung wisatawan banyak yang berusaha mengambil rumput liar, tetapi biasanya disita oleh penjaga di Pos Rowobendo. Yang buruk bukan efek fisik kegiatan itu, tetapi pemanfaatan yang tidak dibutuhkan seperti itu menunjukkan ketidakpahaman tujuan konservasi atau rasa tidak peduli terhadap kawasan TNAP. Pemanfaatan itu dianggap bebas atau gratis, malah mendukung ketidakpahaman terhadap adanya TNAP serta tujuan dan manfaat bagi semua pihak.

Walaupun ada akibat non-fisik yang buruk, juga ada akibat yang seharusnya didukung dan dilanjutkan. Dengan pemanfaatan sumber daya alam di TNAP tentu saja ada rasa peduli terhadap keberlanjutannya. Ada masyarakat yang tergantung pada pemanfaatan tersebut yang sadar akan pentingnya sumber daya alam itu tidak sampai kehabisan, karena tidak ada pilihan lain untuk mereka. Dengan demikian ada banyak masyarakat yang peduli tentang pengelolaan TNAP, setidaknya pada tingkat pribadi, dan rasa itu yang harus didukung dan dilanjutkan.

⁵¹ Mahony, 2004, hal 11.

4.4 Bentuk-Bentuk Pengelolaan

Tentu saja semua bentuk gangguan dan akibatnya membuat susah pelaksanaan pengelolaan TNAP. Tetapi persis itu yang harus dihadapi dalam pengelolaan kawasan konservasi seperti taman nasional. Yang jelas selalu akan ada gangguan terhadap taman nasional, hanya jumlah dan bentuknya yang berubah. Yang penting adalah bentuk pengelolaan yang menentukan kesuksesan upaya-upaya konservasi.

Bentuk Pengelolaan Non-Partisipatif

Sesuai dengan fungsinya, TNAP sering mengambil tindakan yang agak keras terhadap bentuk gangguan tertentu. Oleh karena itu Polhut TNAP melakukan berbagai macam patroli, termasuk: patroli di dalam kawasan konservasi, patroli luar di desa-desa sekitar, penghadangan di jalur-jalur yang digunakan oleh pelanggar, dan pengeledahan dengan pencarian hasil hutan.⁵² Dilakukan juga penangkapan, penahanan, dan proses penyidikan kepada pelanggar hutan.

Bentuk Pengelolaan Partisipatif

Ada beberapa aspek pengelolaan TNAP yang melibatkan masyarakat. Program pembinaan daerah penyangga dilaksanakan di daerah penyangga, tetapi juga dilakukan kegiatan kepada orang-orang di luar daerah itu yang peduli terhadap konservasi. Juga ada pengelolaan zona penyangga yang sangat penting terhadap sukses tujuan konservasi TNAP, namun tetap ada masalah dan gangguan.

Penyuluhan

Ada bentuk-bentuk penyuluhan yang merupakan kegiatan khusus ataupun merupakan pembinaan langsung terhadap pelanggar. Penyuluhan khusus sering dilaksanakan oleh para Pengendali Ekosistem Hutan kepada masyarakat dan pelajar dengan pemberian informasi umum.⁵³ Penyuluhan juga diberi kepada masyarakat sekitar hutan terutama

⁵² Sulastriningsih, 2004, hal 17.

⁵³ Pak Bambang, Kepala Sub-Seksi Rowobendo TNAP, wawancara 05/11/2004.

yang hidupnya masih tergantung pada hasil hutan dan pelanggar kawasan konservasi itu.⁵⁴

Bina Cinta Alam dan Kader Konservasi

Kegiatan Bina Cinta Alam dilakukan dengan cara pembinaan pengunjung, penyuluhan kepada masyarakat sekitar, kunjungan ke sekolah-sekolah, serta pembinaan kader konservasi. Pembinaan kader konservasi diharapkan akan membantu kegiatan konservasi dengan tujuan berperan aktif dalam melestarikan kawasan konservasi, dan membangun dan mengembangkan infrastruktur dan peran sosial masyarakat sekitar.⁵⁵

Bantuan Daerah Penyangga

Bentuk bantuan yang sudah diberikan kepada daerah penyangga termasuk bantuan ternak (domba, lebah madu, sapi), bantuan tanaman (bibit mangga, bibit bambu, tanaman obat), dan peralatan seni (wayang, karawitan, senitabuh/jaranan).⁵⁶ Bantuan itu sudah mulai sejak tahun 1999 dan tetap dilaksanakan. Berdasarkan studi literatur, konsultasi dan wawancara dengan masyarakat, bentuk bantuan yang paling bermanfaat diberikan kepada masyarakat yang paling tergantung pada sumber daya alam TNAP. Dengan demikian masyarakat memiliki kesibukan dan ekonominya ditingkatkan, sehingga ketergantungan pada pemanfaatan kawasan konservasi itu semakin dikurangi. Bentuk-bentuk bantuan itu sudah membantu banyak masyarakat, dan sebagai akibat meringankan ketergantungan pada kawasan konservasi.

Tetapi walaupun sudah jalan dengan baik, tetap ada masalah. Dana yang bisa digunakan sangat sedikit, sehingga bentuk bantuan terbatas.⁵⁷ Misalnya pada awalnya banyak masyarakat ingin diberi sapi, tetapi akhirnya terlalu mahal untuk dibeli oleh Balai TNAP dan sedikit saja yang bisa diberikan kepada masyarakat. Ada juga masalah dengan cara pembagian bantuan. Kadang kepala desa atau tokoh lain mempunyai keinginan lain, dan tidak tentu bantuan diterima oleh warga-warga desa

⁵⁴ Sulastriningsih, 2004, hal 17-18.

⁵⁵ Sulastriningsih, 2004, hal 18.

⁵⁶ Sulastriningsih, 2004, hal 20.

⁵⁷ Pak Hudiyo, Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo, wawancara 05/11/2004.

yang paling butuh bantuan itu. Juga ada hal penduduk yang semakin bertambah, yang menyebabkan upaya bantuan itu belum pernah mencukupi.

Bantuan tersebut sudah sangat membantu, dan ada kenaikan kesadaran masyarakat tentang konservasi.⁵⁸ Walaupun begitu, upaya itu masih kurang efektif. Dengan permasalahan tersebut bantuan daerah penyangga masih bisa diperbaiki.

Pengelolaan Zona Penyangga

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan upaya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi. Dalam program PHBM, yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani, sejumlah masyarakat menanam dan mengelola tanaman hutan produksi sampai pohonnya sudah berumur kurang lebih enam tahun. Selama ini masyarakat juga boleh menanam tanaman pertanian sebelum pohon produksi terlalu besar. Selain membantu Perum Perhutani mengelola hutan produksi, program itu sangat penting karena merupakan salah satu cara pengelolaan resmi pemanfaatan zona penyangga yang memberikan tanah lebih luas kepada masyarakat.

Salah satu gangguan terhadap pengelolaan zona penyangga TNAP adalah korupsi di dalam Perum Perhutani. Sudah muncul masalah pencarian dana pada tingkat lokal. TNI dan Polri sering terlibat dengan hutan produksi karena sejak desentralisasi mulai harus lebih mandiri dengan pencarian dana.⁵⁹ Perum Perhutani yang membiarkan aktivitas itu dengan cara kolusi. Namun oknum-oknum Perum Perhutani sendiri yang juga melakukan korupsi. Ada dua cara korupsi yang utama dalam pengelolaan zona penyangga. Tanah sering dijualbelikan dan ada pembayaran dengan kayu.

Secara resmi, tanah yang dikelola masyarakat tidak harus dibeli. Perum Perhutani bermanfaat dengan mengerjakan masyarakat, dan masyarakat bermanfaat dengan menggunakan tanah Perum Perhutani untuk menanam tanaman pertanian. Walaupun begitu, ada oknum-oknum Perum Perhutani yang memaksa masyarakat membeli

⁵⁸ Pak Bambang, wawancara 05/11/2004.

Orang pengambil kuwuk, wawancara 07/11/2004.

⁵⁹ Mahony, 2004, hal 12.

tanah itu. Walaupun mahal, tanah itu masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tetap dibeli.

Akibatnya terhadap baik situasi ekonomi di daerah penyangga maupun keadaan kawasan TNAP sangat buruk. Daripada orang siapapun, orang yang mempunyai uang lebih mampu menggunakan tanah Perum Perhutani itu. Itu bukan pengelolaan bersama masyarakat yang akan memperbaiki kehidupannya dan meningkat ekonominya, tetapi merupakan pengelolaan yang mendukung dan memperkuat strata ekonomi yang sudah ada. Apalagi, zona penyangga itu berada sebagai zona di antara kawasan konservasi dan kawasan pemukiman manusia. Dalam fungsinya zona penyangga termasuk fungsi melindungi kawasan konservasi terhadap gangguan dari luar, dan terbaliknya. Kalau pengelolaannya tidak membantu masyarakat yang paling membutuhkan bantuan, maka kawasan konservasi masih akan diganggu olehnya. Mereka tidak bisa memanfaatkan zona penyangga sehingga dipaksa memasuki zona rimba atau zona inti. Makanya cara pengelolaan zona penyangga Perum Perhutani, yaitu PHBM yang condong, pasti tidak sesuai dengan fungsinya.

Kalau dilihat kembali pengelolaan secara resmi, pekerja masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penebangan hutan produksi di zona penyangga sebenarnya diberi upah oleh Perum Perhutani. Tetapi, kenyataan di lapangan para pekerja itu sering dibayar dengan kayu. Secara resmi upahnya uang, tetapi pembayaran yang sebenarnya dengan kayu memenuhi tujuan jangka pendek oknum-oknum Perum Perhutani serta masyarakat. Kalau dibayar dengan kayu pekerja itu menerima barang yang harganya lebih tinggi daripada upah resmi, dan petugas yang memasukkan uang itu ke dalam sakunya. Lagipula ada kemungkinan pengambilan kayu yang lebih banyak, baik dengan kolusi bersama petugas Perum Perhutani maupun tidak.

Sepertinya dalam situasi itu petugas dan pekerja berdua yang bermanfaat, tetapi sebenarnya sangat buruk efeknya. Selain mendukung KKN, pandangan jangka pendek dan kesalahpahaman TNAP yang didukung oleh tindakan-tindakan tersebut.

Semua itu menyebabkan pengelolaan zona penyangga menjadi tidak jelas. Keberadaan korupsi berarti pengelolaan itu ditentukan oleh kemauan dan keputusan individu-individu yang sulit diramalkan. Namun seharusnya ditentukan pengelolaan

resmi yang berlaku sampai tingkat bawah. Karena manfaat-manfaat jangka pendek yang ditunjuk sebagai lebih diinginkan, maka peran jangka panjang zona penyangga itu lebih sulit dipahami oleh masyarakat. Efek-efek upaya penyuluhan terhadap masyarakat dikurangi. Balai TNAP yang melaksanakan penyuluhan, tetapi sebagai akibat cara-cara pengelolaan zona penyangga tersebut pelaksanaan penyuluhan itu lebih susah.

Lagipula kredibilitas TNAP berkurang karena seolah-olah tujuan jangka tengah sampai panjang yang diutamakan para pengelola itu tidak dianggap bermanfaat oleh masyarakat. Balai TNAP berperan yang lebih keras dalam pendekatan pengelolaan keragaman hayati dan integritas ekosistem-ekosistem yang terlindung.

4.5 Alternatif Pengelolaan Taman Nasional Alas Purwo

TNAP sudah disebut salah satu taman nasional yang paling stabil dan aman di Indonesia.⁶⁰ Anggapan itu muncul karena keberadaan zona penyangga yang memiliki sumber daya alam dan dilakukan kegiatan oleh masyarakat di luar kawasan konservasi yang sebenarnya, penyuluhan dan kegiatan seperti itu, pembinaan daerah penyangga termasuk bantuan ternak, tanaman, dan peralatan seni, serta anggapan yang masih agak kuat tentang suasana angker dan keramat di sana.

Walaupun begitu, masih ada kekurangan dalam pengelolaan TNAP. Dari semua pihak ada yang sadar akan korupsi dan ketidaksesuaian dalam pengelolaan zona penyangga.⁶¹ Pengetahuan itu berada di Balai TNAP, dalam Perum Perhutani, dan masyarakat sekitar yang tahu juga. Tetapi belum ada cara yang efektif untuk melawan korupsi itu dan membuat pengelolaan zona penyangga lebih luas. Belum juga ada dana yang mencukupi untuk melakukan patroli, serta melaksanakan upaya bantuan dan pembinaan daerah penyangga. Dan anggapan bahwa kawasan TNAP angker dan keramat dikatakan sudah mulai berkurang.

⁶⁰ Pak Bambang, wawancara 05/11/2004.

⁶¹ Pak Bambang, wawancara 05/11/2004.

Petugas Perum Perhutani, daerah penyangga Taman Nasional Alas Purwo, wawancara 08/11/2004.
Mas Banadi, warga Dusun Kutorejo, wawancara 02/11/2004.

Yang jelas, dengan cara-cara pengelolaan yang sedang dilaksanakan di TNAP, tidak akan ada perubahan yang drastis. Keadaan ekonomi di daerah penyangga dan pelaksanaan kelestarian dan konservasi di dalam TNAP sedang hanya berubah dengan pelan.

Kalau benar-benar ingin diubah untuk memperbaiki situasi ekonomi masyarakat maupun keberlanjutan kawasan konservasi, seharusnya cara pengelolaan berubah menjadi lebih partisipatif lagi. Sekarang ini pengelolaan TNAP sudah mulai mengikuti cara-cara yang bisa disebut partisipatif. Antara lain penyuluhan, pembinaan daerah penyangga, dan program PHBM melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Pada umumnya Balai TNAP menunjukkan rasa peduli terhadap baik pihak kemanusiaan maupun lingkungan alam. Tetapi keterlibatan masyarakat masih terbatas di tingkat agak bawah.

Masyarakat diberikan bantuan, menerima penyuluhan, dan diperbolehkan memakai tanah zona penyangga. Namun masyarakat belum mempunyai peran yang aktif dalam pengelolaan TNAP, dengan memutuskan dalam proses itu. Makanya bisa dikatakan TNAP sedang mengalami masa peralihan. Cara-cara pengelolaan sudah mulai menjadi partisipatif, tetapi belum dikembangkan secara sepenuhnya.

Kalau pengelolaan TNAP dikembangkan menjadi pengelolaan partisipatif yang sebenarnya, upaya mencari keseimbangan antara masyarakat dan kawasan konservasi itu akan diperbaiki dan diperkuat. Dengan lebih banyak pihak yang terlibat, proses pengelolaan menjadi lebih transparan dan terbuka, berarti lebih jelas. Adanya dialog juga, yang membantu membuat jelas komunikasi antara masyarakat, para pengelola dan pihak lain. Dengan keterlibatan lebih banyak orang, dan kenaikan kesadaran tentang pentingnya konservasi, sumber manusia menjadi lebih banyak juga. Potensi-potensi seperti wisata alam bisa dikembangkan sesuai dengan kemauan semua pihak, atau setidaknya permasalahan bisa didebatkan supaya hasil yang paling bermanfaat akan dicapai.

Memang di atas ditulis hasil pengelolaan partisipatif yang ideal. Namun tidak mudah tujuan-tujuan itu dicapai dan proses itu perlu banyak waktu. Ketergantungan masyarakat pada sumber daya alam juga tidak bisa cepat diubah. Tetapi jelas juga

dalam konteks pengelolaan taman nasional tidak mungkin dan juga tidak arif masyarakat lokal dilarang ikut serta merumuskan kebijakan dan pengelolaan taman nasional.⁶²

Pengelolaan partisipatif bukan hanya merupakan peluang kepada masyarakat untuk mengeksploitasi TNAP. Peluang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya dari segi pemanfaatan, tetapi juga dalam hal perlindungan dan pelestariannya.⁶³

Sebagai salah satu taman nasional yang paling stabil dan aman di Indonesia, TNAP memiliki peluang yang sangat mungkin untuk menjadi contoh pengelolaan yang sangat efektif di negara itu. Karena cara pengelolaan sudah mulai berubah memiliki aspek-aspek partisipatif, lebih mudah perubahan itu dilanjutkan sampai masyarakat dan pihak-pihak lain berperan dalam pengelolaan TNAP. Selain menjamin keberlanjutan kawasan konservasi itu serta ekonomi masyarakat sekitar dengan lebih baik, TNAP ada kesempatan menjadi contoh untuk membantu taman nasional lain di Indonesia melaksanakan pengelolaan yang lebih arif dan efektif.

⁶² Sulastriningsih, 2004, hal 24.

⁶³ Sulastriningsih, 2004, hal 24.

5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- Ketergantungan masyarakat sekitar TNAP sangat tinggi, dan bentuk-bentuk interaksi dan pemanfaatan bermacam-macam.
- Ada aspek-aspek pengelolaan TNAP yang efektif dan sudah mulai menjadi pengelolaan partisipatif.
- Namun perubahan situasi ekonomi masyarakat dan kelestarian kawasan konservasi belum sangat efektif.
- Bisa dikatakan pengelolaan TNAP sedang mengalami masa peralihan menuju ke arah lebih bersifat partisipatif.
- Upaya untuk mengembangkan pengelolaan TNAP menjadi pengelolaan partisipatif akan lebih menjamin keberlanjutan kawasan konservasi serta ekonomi dan budaya masyarakat.

5.2 Saran

- Masyarakat dilibatkan oleh TNAP dan Perum Perhutani dalam pengelolaan dan memutuskan dalam hal-hal yang langsung mempengaruhi kehidupannya.
- Pengajian tentang bagaimana cara pelaksanaan pengelolaan partisipatif seharusnya dilakukan sesegera mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2004, *Kronologi Pengelolaan Zona Penyangga Taman Nasional Alas Purwo*, Balai Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi.
- Anonim, 2002, *Profil Desa/Kelurahan, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi: Profil Desa Kalipahit*, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Propinsi Jawa Timur, Banyuwangi.
- Anonim. 2003, *Profil Desa/Kelurahan, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi: Profil Desa Kedungasri*, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Propinsi Jawa Timur, Banyuwangi.
- Badan Pusat Statistik, *Ulasan Singkat Nasional: Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000*, online, http://www.bps.go.id/sector/population/Pop_indo.htm diakses 04/01/2005.
- Bison, Buffalo, and Cattle Taxon Advisory Group, *Banteng*, online, http://www.csew.com/cattletag/Cattle%20Website/Fact_Sheets/Banteng/banteng.htm diakses 27/11/2004.
- Departemen Kehutanan, *50 Taman Nasional di Indonesia*, online, http://www.dephut.go.id/INFORMASI%20INDO-ENGLISH/tn_index.htm diakses 30/11/2004.
- Departemen Kehutanan, *Taman Nasional Alas Purwo*, online, http://www.dephut.go.id/INFORMASI/TN%20INDO-ENGLISH/tn_alaspurwo.htm diakses 01/12/2004.
- Durbin, L.S., Venkataraman, A., Hedges, S. Dan Duckworth, W. 2004, "Chapter 8.1: Dhole Cuon Alpinus," hal 210-222, dalam Sillero-Zubiri, C., Hoffmann, M. dan Macdonald, D.W. (redaksi) 2004, *Canids: Foxes, Wolves, Jackals and Dogs. Status Survey and Conservation Action Plan*, IUCN/SSC Canid Specialist Group, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, online, <http://www.canids.org/cap/CANID6.pdf> diakses 27/11/2004.
- IUCN Red List of Threatened Species, *Species Information: Bos Javanicus*, online, <http://www.redlist.org/search/details.php?species=2888> diakses 04/01/2005.
- Listiyowati, A.I. 2004, *Studi Zonasi di Taman Nasional Alas Purwo*, dalam rangka Magang CPNS Departemen Kehutanan, Balai Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi.
- Mahony, I. 2004, "The magic of Alas Purwo National Park," dalam *Inside Indonesia*, No. 80 October – December 2004, hal 11-12, IRIP, Melbourne.
- Nur Patria K., Fauzi M., Pudjiadi, Masudah, Sulastini, D. dan Suryaningsih, R. 2003, *Buku Informasi Taman Nasional Alas Purwo*, Balai Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi.

Permana, H. 2004, *Pola Umum Gangguan Hutan di Balai Taman Nasional Alas Purwo*, dalam rangka Magang CPNS Departemen Kehutanan, Balai Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi.

ProFauna Indonesia, *Fakta Tentang Satwa Indonesia*, online, http://www.profauna.or.id/Indo/Fakta_satwa.html diakses 27/11/2004.

Putro, H.R. 2001, *Participatory Management of National Park and Protection Forest: a New Challenge in Indonesia*, online, http://www.nourin.tsukuba.ac.jp/~tasae/2001/Indonesia_2001.pdf diakses 01/10/2004.

Soewardi, H. 1978, *Menyongsong Taman Nasional (National Park) di Indonesia*, Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam, Direktorat Jenderal Kehutanan.

Sulastriningsih, D. 2004, *Pengelolaan Daerah Penyangga Sebagai Benteng Pertahanan Kawasan Konservasi*, dalam rangka Magang CPNS Departemen Kehutanan, Balai Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi.

Suryanta, J. 2004, *Kemungkinan Penetapan Blok Sumber Gedang Sebagai Padang Pengembalaan Untuk Pelestarian Banteng (Bos javanicus d'Alton) di Taman Nasional Alas Purwo*, dalam rangka Magang CPNS Departemen Kehutanan, Balai Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi.

UNDP/FAO (berdasarkan karya John MacKinnon, FAO) 1981, *National Conservation Plan for Indonesia Vol III*, laporan lapangan disediakan untuk Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam, Direktorat Jenderal Kehutanan, Bogor.

United States Census Bureau, *IDB Summary Demographic Data for Indonesia*, online, <http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/idbsum?cty=ID> diakses 04/01/2005.

United States Census Bureau, *IDB Countries Ranked by Population: 2004*, online, <http://.census.gov/cgi-bin/ipc/idbrank.pl> diakses 04/01/2005.

Widianarko, B. 1998, *Ekologi dan Keadilan Sosial*, Kanisius, Yogyakarta.

DAFTAR WAWANCARA

Kris, tokoh masyarakat Gintangan, wawancara 2/10/2004.

Mas Cipto, petugas Polisi Hutan Balai Taman Nasional Alas Purwo, wawancara 03/10/2004, 08/11/2004.

Orang-orang pengambil kermis, di tempat pengambilan kermis dekat Ngagelan, wawancara 4/10/2004.

Pak Joe, petugas pensiunan Balai Taman Nasional Alas Purwo, wawancara 30/10/2004.

Warga Dusun Kutorejo, Desa Kalipahit, wawancara 31/10/2004.

Pemilik gerandong, Dusun Erpa, Desa Kendalrejo, wawancara 2/11/2004.

Mas Banadi, warga Dusun Kutorejo, wawancara 02/11/2004.

Pak Bambang, Kepala Sub-Seksi Rowobendo Taman Nasional Alas Purwo, wawancara 05/11/2004.

Pak Hudyono, Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo, wawancara 05/11/2004.

Orang pengambil kuwuk, Dusun Purworejo, Desa Kalipahit, wawancara 7/11/2004.

Petugas Perum Perhutani, daerah penyangga Taman Nasional Alas Purwo, wawancara 08/11/2004.

LAMPIRAN A

Peta Taman Nasional Alas Purwo



Sumber: <http://www.alaspurwonationalpark.com> diakses 15/11/2004.

LAMPIRAN B

Definisi Zona Penyangga dan Ex-Zona Penyangga

Mulai pada tanggal 30 Desember 1998 melalui Surat Nomor: 12/BTN-AP/2/1998 tentang *zona penyangga* seluas 1303 ha yang dikelola oleh Perum Perhutani, diusulkan pengelolaannya diserahkan kepada Balai Taman Nasional Alas Purwo (TNAP). Tetapi sampai sekarang hal itu belum diselesaikan. Perum Perhutani tidak mengelola zona penyangga sesuai dengan fungsinya (lihat **Bentuk Pengelolaan Partisipatif**, hal 32). Demi kepentingan konservasi serta kepentingan masyarakat sekitar, Balai TNAP ingin: *zona penyangga* diserahkan kepada Balai TNAP oleh Perum Perhutani; Perum Perhutani tetap mengelola *zona penyangga* yang menjadi satu kesatuan dengan TNAP dengan sistem pengelolaan yang sesuai dengan visi taman nasional; atau, Perum Perhutani mengelola penuh *zona penyangga* sesuai dengan visi dan misi TNAP dalam pengelolaannya.¹

Sudah lama permasalahan tersebut belum diselesaikan, sehingga *zona penyangga* itu mulai disebut *ex-zona penyangga* oleh pihak TNAP. Karena tidak dikelola sesuai dengan fungsinya, maka zona itu disebut *ex-*, atau mantan, *zona penyangga* untuk menekankan ketidaksesuaian itu.

Walaupun saya mendukung pihak TNAP dalam hal tersebut, malah zona itu tetap disebut *zona penyangga* dalam laporan ini. Pertama, saya ingin laporan ini lebih sederhana, dan penggunaan sebutan tersebut yang paling tidak membingungkan. Dan kedua, bahkan pengelolaannya seharusnya diperbaiki, zona itu tetap memiliki fungsi sebagai penyangga antara kawasan pemukiman dan kawasan konservasi. Makanya zona itu tetap disebut *zona penyangga* dalam laporan ini.

Definisi Zona Penyangga dan Daerah Penyangga

Zona penyangga merupakan zona resmi dalam kawasan TNAP yang terletak di antara pemukiman dan kawasan konservasi yang sebenarnya. Dengan demikian begitu, *zona penyangga* berfungsi untuk melindungi kawasan konservasi terhadap gangguan dari luarnya, dan melindungi kawasan pemukiman terhadap gangguan dari kawasan konservasi.

Istilah *daerah penyangga* menunjuk kepada baik daerah pemukiman yang terletak di antara kawasan konservasi itu dan daerah pemukiman lain, maupun *zona penyangga*. Masyarakat di *daerah penyangga* sering memanfaatkan sumber daya alam di kawasan konservasi yang begitu dekat, maka dari itu *daerah penyangga* mempengaruhi dan dipengaruhi TNAP secara langsung.

¹ Anonim. 2004, *Kronologi Pengelolaan Zona Penyangga Taman Nasional Alas Purwo*, Balai Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi.